

PENATAAN KAWASAN PESISIR PANTAI DESA BAKAUHENI SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA

Oleh :

Irma Fitriana **, Lis Noer Aini, SP, M.Si.***, Dr. Ir. Gatot Supangkat, M.P.***
Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMY.

INTISARI

Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni merupakan salah satu lokasi yang memiliki daya tarik wisata, karena menyajikan keindahan berupa pemandangan pantai, pemandangan pulau-pulau kecil serta memiliki potensi lahan pertanian yang berada di sekitar perbukitan. Namun, kawasan ini belum difungsikan secara optimal. Oleh karena itu, Skripsi yang berjudul “Penataan Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakauheni Sebagai Kawasan Ekowisata”, dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi dan menyusun konsep penataan kawasan pesisir pantai sebagai kawasan ekowisata mangrove guna meningkatkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2017, menggunakan metode survey. Pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara serta pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dan pemerintah sebagai responden terkait dengan pengembangan wisata berbasis ekowisata yakni 100% masyarakat setuju, sedangkan pemerintah 62,5% menyatakan sangat setuju dan 37,5 % setuju. Penataan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni ditentukan berdasarkan hasil indentifikasi potensi kawasan (potensi pertanian, potensi perikanan, potensi sumber daya alam (hutan mangrove dan pantai), potensi sosial budaya dan ekonomi) serta zonasi kawasan (zona konservasi, zona pemanfaatan (kawasan budidaya) dan zona pengembangan). Penataan lokasi pengembangan wisata (ekowisata) dibuat sebagai rekomendasi pemanfaatan kawasan sesuai acuan peraturan pemerintah.

Kata kunci : Penataan kawasan, kawasan pesisir pantai, Ekowisata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang secara administrasi sebagian besar wilayahnya tertelak pada garis pesisir pantai. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan (2014), Lampung Selatan memiliki panjang garis pantai 180 km, dengan luas perairan laut 173.347 hektar. Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang cukup besar di bidang pariwisata, baik wisata

alam, wisata terpadu/buatan, wisata bahari maupun wisata budaya. Berdasarkan data statistik pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016, jumlah wisatawan nusantara tahun 2015 mencapai 334, 546 untuk kunjungan objek wisata bahari.

Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni merupakan salah satu lokasi yang memiliki daya tarik wisata, karena menyajikan keindahan berupa pemandangan pantai, pemandangan pulau-pulau kecil seperti Pulau Kelapa, Pulau Sindu, Pulau Kandang Lunik, Pulau Kandang Balak dan gugus Gunung Anak Krakatau serta memiliki potensi lahan pertanian yang berada di sekitar perbukitan. Selain itu, kawasan ini juga memiliki daya tarik lain sebagai lokasi pemancingan serta terdapat area lahan tambak udang dan mangrove yang berada sekitar kawasan. Adanya tambak udang dan mangrove yang berada dalam satu ruang lingkup kawasan. Bila tidak dikelola dengan baik nantinya memiliki dampak seiring dengan perkembangan lahan tambak yang terus terjadi dan meluas. Pengembangan lahan tambak secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak swasta maupun masyarakat demi memperoleh keuntungan dapat berimbas terhadap ruang tumbuh mangrove. Alih fungsi dan tergerusnya ruang tumbuh mangrove berdampak pada rusaknya ekosistem pantai sekitar. Fungsi mangrove sebagai tanggul penangkis ombak akan hilangnya akibat pergeseran dan berkurangnya ruang tumbuh mangrove. Adanya hal tersebut tanpa disadari akan mengakibatkan pantai menjadi rentan terhadap gerusan ombak sehingga terjadi abrasi pantai.

Salah satu upaya untuk mencegah alihfungsi kawasan hutan mangrove menjadi lahan tambak dan kepentingan pembangunan yaitu dengan menjadikan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sebagai kawasan wisata. Bentuk wisata yang dapat dikembangkan di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni ialah ekowisata. Ekowisata merupakan suatu konsep wisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian yang bertujuan mengintegrasikan tujuan konservasi alam dengan tujuan pembangunan ekonomi dengan melibatkan masyarakat lokal (Putra Alam, 2012). Melalui pengembangan ekowisata diharapkan dapat menjaga dan melindungi ekosistem hutan mangrove, fungsi hutan mangrove maupun ekosistem pantai sebagai kawasan konservasi yang perlu dijaga kelestariannya. Kenyamanan, keunikan, keindahan alam dan keaslian adalah aset penting untuk menarik kunjungan wisata. Oleh sebab itu, faktor kualitas lingkungan menjadi modal penting yang wajib disediakan.

Maka dari itu, indentifikasi potensi kawasan mangrove serta penataan kawasan perlu dikaji lebih lanjut guna mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir pantai Desa Bakauheni sehingga perlu diperhatikan aspek sosial ekonomi, aspek budaya dan lingkungan sangat diperlukan untuk keuntungan semua pihak baik wisatawan, pemerintah maupun masyarakat. Penataan kawasan wisata didasari dengan keberadaan kawasan ruang tumbuh dan keanekaragaman jenis mangrove serta potensi sumberdaya alam lainnya yang mendukung dijadikannya kawasan pariwisata berbasis ekowisata

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi biofisik mangrove di pesisir pantai Desa Bakuheni?
2. Seberapa besarkah potensi hutan mangrove sebagai kawasan wisata di pesisir pantai Desa Bakauheni ?
3. Bagaimana konsep penataan kawasan pariwisata daerah pesisir pantai Desa Bakauheni berdasarkan potensi yang ada?

C. Tujuan Penelitian

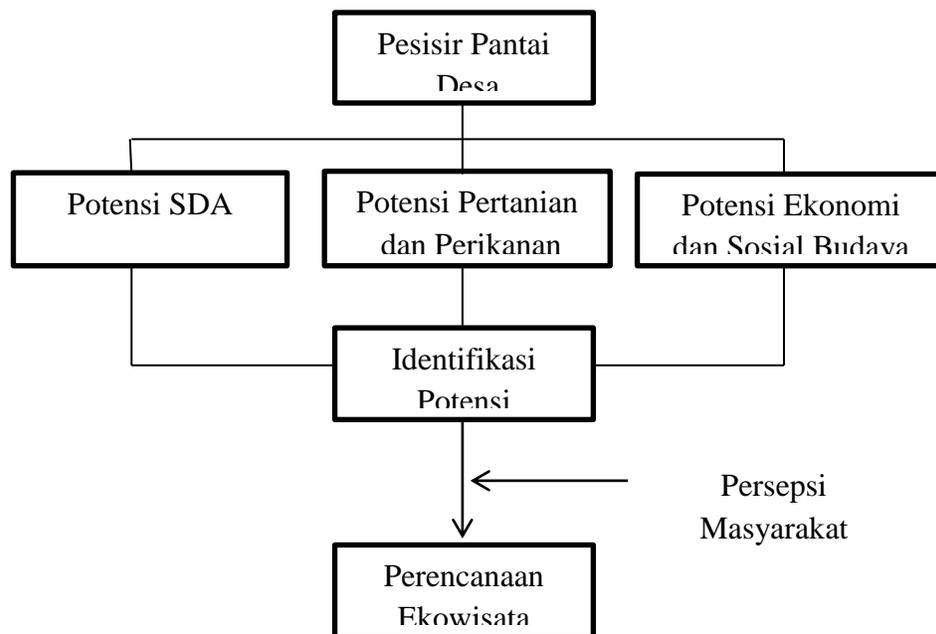
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan menyusun konsep penataan kawasan pesisir pantai sebagai kawasan ekowisata mangrove guna meningkatkan kelestaraan alam dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan penelitian ini sebagai informasi bagi masyarakat maupun lembaga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat mengelola kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni sebagai kawasan ekowisata mangrove. Sehingga dapat meningkatkan potensi kawasan dan difungsikan secara optimal sebagai salah satu destinasi wisata berbasis ekowisata secara berkelanjutan.

E. Batasan Studi dan Kerangka Pikir

Penelitian hanya dilakukan di kawasan pesisir pantai area lahan tambak dan mangrove di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan untuk perencanaan penataan kawasan ekowisata dengan melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Berikut ini arlur skema penelitian :



Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian.

TATA CARA PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir pantai area lahan tambak dan mangrove Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari 2017 sampai Maret 2017.



Gambar 2. Lokasi penelitian

B. Metode Penelitian dan Analisis Data

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yang teknis pelaksanaannya dilakukan dengan observasi dan wawancara.

2. Metode Penentuan Lokasi

Pemilihan lokasi ini ditentukan dengan metode *purposive*. Menurut Antara (2009) dalam Sugepi (2013), *purposive* adalah suatu teknik penentuan secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan (1) Kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni merupakan kawasan yang terletak satu ruang lingkup dengan area tambak udang yang mengalami bergeseran serta alihfungsi kawasan akibat perluasan area lahan tambak udang (2) Kawasan ini belum pernah dilakukan perencanaan pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata edukasi pengenalan jenis mangrove maupun wisata edukasi budidaya udang (3) Kawasan pesisir pantai area lahan tambak dan mangrove memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi daya tarik objek wisata.

3. Pengambilan Sampel Responden

Responden masyarakat dipilih dari dusun dalam kawasan perencanaan yakni Dusun Sukarame yang jumlah KK 77, diambil 35% dari jumlah populasi untuk responden sehingga didapat 23 responden. Dusun yang berbatasan langsung dengan kawasan pesisir pantai area lahan tambak dan mangrove yakni Dusun Pegantungan yang jumlah KK 134, diambil 10% dari jumlah populasi untuk responden sehingga didapat 10 responden. Dusun yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan dan penikmat yang letaknya berjauhan dengan dusun dalam kawasan perencanaan wisata yaitu Dusun

Simpang Tiga yang jumlah KK 129, di ambil 5% dari jumlah populasi untuk responden sehingga didapat 5 responden. Sehingga total jumlah responden dari ketiga dusun didapat yakni 38 responden serta digunakan juga 8 orang responden dari pihak lembaga terkait. Sehingga, total keseluruhan jumlah reponden yang akan diambil adalah 46 orang.

4. Penentuan Sampel Mangrove

a. Penentuan titik sampel kerapatan mangrove

Penentuan titik pengambilan sampel kerapatan tanaman dilakukan berdasarkan tingkat kerapatan tanaman mangrove yakni sangat rapat, sedang dan jarang. Pengambilan dan penghitungan sampel vegetasi mangrove dilakukan dengan membuat petakan (plot) dibuat dengan ukuran 10 m x 10 m, jalur dibuat dengan arah tegak lurus dengan pantai (Kusmana, 1997 dalam Saru 2013). Perhitungan besarnya nilai kuantitatif parameter vegetasi dilakukan dengan formula berikut ini : (Bengen, 2002 dan Kusmana, 1997 dalam Amran Saru 2013).

$$Di = \frac{ni}{A}$$

Dimana : Di = Kerapatan jenis mangrove

ni = Jumlah total tegakan dari jenis mangrove

A = Luas total area plot/ Transek

b. Penentuan titik sampel pengambilan tanah

Penentuan titik sampel tanah dilakukan di dusun yang terdapat tanaman manrove yaitu Dusun Pegantungan dan Dusun Sukarame. Pengambilan sampel tanah dari ke dua dusun masing-masing sebanyak tiga titik yakni pada muara, tengah dan tepi pantai mewakili kawasan. Sampel tanah diambil dengan kedalaman satu meter pada perakaran tanaman mangrove. Kemudian sampel dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui pH dan salinitas.

5. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis spasial. Metode analisis deskripsi adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan hubungan satu dengan yang lainnya pada lingkup aspek yang diteliti (Asnawi, 1995 dalam Windasari, 2006). Analisis ini didasarkan pada potensi, keragaman jenis mangrove dan kendala pada kawasan pesisir pantai area lahan tambak dan mangrove Desa Bakauheni, ditinjau dari tujuan pengembangan ekowisata pantai di kawasan tersebut. Menurut Gunn (1994) dalam Windasari (2006), analisis spasial dilakukan untuk menentukan tata ruang wisata di kawasan studi menggunakan system informasi geografi dan secara manual berdasarkan konsep wisata.

6. Perencanaan Lanskap

a. Kompleks Atraksi (*Attraction Complexes*)

c. Komunitas Pelayanan (*Service Community*)

- d. Transportasi dan Akses (*Transportation and Acces*)
- e. Koridor Penghubung (*Linkage Corridors*)

C. Jenis Data

Tabel 1. Jenis data yang diambil dalam penelitian

No	Jenis Data	Variabel Pengamatan	Lingkup	Bentuk Data	Sumber
1	Peta Wilayah Desa Bakuheni	a. Perkembangan pembangunan kawasan/wilayah b. Perubahan luasan kawasan/ruang tumbuh mangrove	-	Hard & soft copy	BAPPEDA
2	Letak Geografis wilayah	a. Keterjangkauan lokasi wisata b. Luasan Kawasan arean tambak dan mangrove c. Indentifikasi potensi kawasan	a. Batas wilayah b. Luas Wilayah c. Ketinggian Tempat	Hard & soft copy	BAPPEDA
3	Iklim	a. Keragaman jenis dan varietas mangrove. b. Kerapatan tanaman mangrove.	a. CH (Curah Hujan) b. Salinitas c. Ph	Data Primer dan sekunder	Dinas Perikanan dan survey lapangan
4	Kondisi Sosial dan Ekonomi	Daya dukung masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata	a. Jumlah Penduduk b. Kepadatan penduduk c. Mata Pencaharian d. Pendidikan e. Sebaran Usia	Hard & soft copy	BAPPEDA dan wawancara perangkat dusun.
5	Presepsi Masyarakat dan pemerintah	Persepsi dalam pengembangan kawasan wisata	Pengembangan wisata, Kondisi Wilayah dan fenomena yang sering terjadi di lokasi penelitian	Wawancara	Wawancara langsung dan survei lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Pesisir Pantai

Pesisir timur merupakan pesisir pantai yang masuk dalam perairan selat Sunda. Secara keseluruhan panjang garis pantai Kabupaten Lampung Selatan mencapai 247,76 Km² yang meliputi Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Ketapang, Bakauheni, Rajabasa, dan Sragi. Sedangkan pantai timur sendiri memiliki garis patai sepanjang 270 km. Pesisir pantai timur Lampung merupakan bagian dari Laut Jawa memiliki perairan relatif landai, berkarang dengan tingkat sedimentasi yang tinggi. Karakteristik garis pantai terdiri dari pantai pasir putih, kuarsa, silika, lanau dan secara lokal di tempat endapan lumpur rawa. Genesis wilayah pesisir timur ini merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang merupakan perluasan Busur Belakang Pegunungan Bukit Barisan Timur kearah timur yang Kenozoikum. Selama awal sejarah pembentukan cekungan ini, pengendapan oleh laut sangat dominan dan kemudian diikuti oleh pengendapan susut laut. Kegiatan gunung api di Pegunungan Barisan memberikan limpahan bahan tufa dan batu apung di bagian timur Lampung. Endapan rawa, endapan alluvium dan endapan pantai yang luas di bagian timur Provinsi Lamung ini, terbentuk pada masa Holosen. Wilayah timur ini dapat di tumbuhi oleh banyak mangrove karena memiliki endapan lumur yang cukup banyak sebagai habitat utama mangrove.

2. Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bakauheni keseluruhan memiliki luasan 37,5 hektar. Saat ini kawasan mangrove pesisir pantai Desa Bakauheni memiliki luas kurang lebih 4,5 hektar yang berada di Dusun Pegantungan dan 5,5 hektar yang berada di Dusun Sukarame. Tingkat kerapatan mangrove yang terdapat kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni tersaji pada tabel 6.

Tabel 2. Kerapatan tanaman mangrove

No	Sampe l	Jumlah vegetasi (100 m ²)	Kerapatan jenis (Di)
1	I	24	0,24
2	II	30	0,30
3	III	34	0,34
Rata-rata			0,29

Sumber : Data Primer 2017.

Sedangkan jenis mangrove lainnya tersaji dalam tabel 7.

Tabel 3. Jenis mangrove yang ada di pesisir patai Desa Bakuheni

No	Jenis	Nama Lokal
1	<i>Avicennia alba</i>	Api-api
2	<i>Avicennia marina</i>	Api-api
3	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	Tanjang merah
4	<i>Bruguiera cylindrical</i>	Tanjang putih
5	<i>Ceriops tagal</i>	Setigi
6	<i>Rhizophora apiculata</i>	Bakau kecil
7	<i>Rhizophora mucronata</i>	Bakau besar
8	<i>Sonneratia alba</i>	Pidada
9	<i>Sonneratia caseolaris</i>	Pidada
10	<i>Excoecaria agallocha</i>	Buta-but
11	<i>Scyphipora hydrophyllacea</i>	Duduk rambat

Sumber : Data Primer 2017.

Keragaman jenis mangrove yang tumbuh alami di sepanjang pesisir pantai desa bakuheni tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove diantaranya yakni pH dan salinitas. Berikut data pH dan salinitas tersaji pada tabel 8.

Tabel 4. Hasil pengukuran parameter lingkungan salinitas dan pH.

No	Nama Dusun	Sampel	pH	Salinitas (mS)
1	Pegantungan	1	7.5	6.3
		2	7.57	7.17
		3	7.62	6.35
		Rata-rata	7.56	6.61
2	Sukarame	1	7.29	6.09
		2	7.42	6.6
		3	7.65	4.41
		Rata-rata	7.45	5.70

Sumber : Data Primer 2017.

3. Pengurangan Ekosistem Mangrove di Pesisir Pantai Desa Bakuheni

Secara umum di sepanjang pantai Desa Bakuheni mengalami pengurangan vegetasi mangrove. Sebagian besar mangrove asli yang tumbuh secara alami sudah rusak akibat penebangan untuk pembukaan lahan tambak secara besar-besaran pada tahun 1998 dan pembangunan dermaga pelabuhan. Kerusakan mangrove di sepanjang pesisir pantai Desa Bakuheni diakibatkan faktor alam dan faktor sosial.

B. Potensi Petanian dan Perikanan

a. Potensi Pertanian

Komoditas utama Desa Bakuheni adalah jagung, sedangkan komoditas lainnya yang dibudidayakan yakni pisang, cabai, melon dan padi.

b. Potensi Perikanan

Sektor perikanan merupakan potensi lain yang dimiliki kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni. Mata pencaharian sebagai nelayan telah menjadi bagian dari kearifan lokal kedua di Desa Bakuheni tersebut khususnya penduduk yang tinggal di pesisir pantai.

Tipe nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan dengan perahu dan nelayan dengan jala .

Pengembangan tambak udang di pesisir Desa Bakuheni mulai tahun 1990-an. Pengembangan lahan tambak udang diawali oleh PT. Maju Tambak Sumur pada tahun 1998 mengelola lahan seluas 32 hektar. Kemudian pada tahun 2000-an PT. Acai masuk dan menggarap lahan tambak seluas 31 hektar, dan tambak perorangan milik Sukenda mengelola lahan seluas 15 hektar serta petambak rakyat yang menggarap lahan milik CV. Citra Cakra Murdaya. Sebagian besar petambak membudidayakan udang jenis vaname dan jenis ikan air tawar bandeng.

C. Persepsi Masyarakat dan Pemerintah

1. Persepsi Masyarakat

a. Hutan Mangrove

➤ Pengetahuan masyarakat tentang hutan mangrove

Berdasarkan tabel hasil kuesioner menunjukkan bahwa 71,05 % responden menyatakan bahwa hutan mangrove yang terdapat dipesisir pantai tumbuh secara alami dan 7,89 % adalah upaya penanaman dari pemerintah. Hasil kuisisioner juga menunjukkan 100 % masyarakat mengetahui pentingnya hutan mangrove pada kawasan pesisir pantai. Pengetahuan masyarakat mengenai peran dan fungsi mangrove sebesar 92,11 % masyarakat menyatakan telah mengetahui. Sedangkan kondisi hutan mangrove berdasarkan hasil kuesioner sendiri didapat 42,11 % masyarakat menyatakan hutan mangrove yang ada terjaga dengan baik.

➤ Pengetahuan masyarakat tentang peranan dan fungsi hutan mangrove.

Hasil kuesioner 63,16 % masyarakat mengetahui peran dan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi, 28,95 % pelindung pemukiman penduduk dari terpaan angin laut, 23,68 % mencegah intruksi air laut dan 3,16 % sebagai wilayah peyangga. Artinya, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Bakuheni tentang hutan mangrove beserta peranan dan fungsinya sudah baik. Artinya dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan peran mangrove menjadi dasar keberhasilan pengelolaan mangrove dapat dioptimalkan melalui strategi pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat yang mengandung arti keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam. Mengelola disini mengandung arti, masyarakat ikut memikirkan, merencanakan, memonitor dan mengevaluasi sumberdaya ekosistem hutan mangrove dan manfaat sumberdaya tersebut secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem tersebut (Bengen, 2002).

b. Ekowisata

➤ Pengetahuan masyarakat tentang ekowisata.

Berdasarkan hasil kuisioner diatas menunjukkan bahwa 86,84 % responden mengetahui ekowisata dan 13,16% responden tidak mengetahui ekowisata. Hasil kuisioner menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bentuk ekowisata sebagai taman nasioanl sebesar 21,05%, wisata alam 47,37%, wisata hutan raya 13,16% dan yang menjawab lainnya 5,26%. Artinya, tingkat pengetahuan masyarakat desa Bakauheni tentang ekowisata sudah cukup baik. Pengembangan ekowisata di kawasan pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangannya sehingga pengetahuan tentang ekowisata menjadi poin penting yang perlu diketahui. Disini masyarakat menjadi faktor penting dalam perencanaan dan pengembangan wisata sebab keberlanjutan dan keberlangsungan pengembangan wisata ekowisata bergantung pada budaya dan prilaku masyarakat setempat. Jika masyarakat telah memiliki bekal pengetahuan mengenai tidak mendukung dan tidak berpartisipasi dalam pengembangan wisata ekowisata maka pengembangan wisata tidak akan berjalan sesuai harapan.

➤ Persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata di pesisir pantai Desa Bakuheni.

Dari 38 responden yang diwawancarai tentang dukungan masyarakat terhadap pengembangan kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni menjadi ekowisata seluruhnya menyatakan mendukung. Namun, 47,37% menjawab mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaan, 44,47% menjawab mendukung saja dan 5,26% yang menyatakan tidak mendukung. Menurut Slamet (1985) Partisipasi masyarakat sangatlah mutlak demi keberhasilan pembangunan. Selanjutnya menurut beliau pada umumnya dapat dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil.

Berdasarkan tabel diatas juga, masyarakat berpendapat mengenai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan wisata di kawasan pesisir pantai Desa Bakauheni 23,68% dinas pariwisata, 10,53% pemerintah desa, 55,26% masyarakat, dan 5,26% menjawab lainnya. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan wisata sangat diperlukan. Masyarakat memberi andil besar dalam kesuksesan ekowisata. Keterlibatan masyarakat memberikan rasa memiliki, menjaga dan melestarikan ekowisata yang telah dikembangkan. Pemerintah menjadi penanggung jawab penuh dalam pengelolaan kawasan wisata di suatu daerah, pemerintah yang dimaksud ialah Dinas Pariwisata yang membawahi bidang pengelolaan pariwisata suatu

daerah. Badan Lingkungan dan Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pun menjadi penanggung jawab pengembangan wisata pada kawasan konservasi.

- Persepsi masyarakat tentang pengembangan kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni sebagai kawasan ekowisata disajikan dalam tabel 13.

Tabel 13. Persepsi masyarakat terhadap objek wisata yang dikembangkan dan sarana prasarana penunjang wisata kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni.

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1	Objek wisata yang cocok untuk dikembangkan	Wisata pantai	42,11
		Wisata mangrove	42,11
		Taman bermain	5,26
		Kawasan pertanian	2,63
		Lainnya	7,89
2	Sarana dan prasarana yang perlu disediakan	Sarana pendukung (kamar kecil, mushola, dan pusat informasi)	73,68
		Area bermain anak-anak	36,84
		Tempat santai/istirahat pengunjung (gubuk)	52,63
		Rumah makan dan oleh-oleh hasil tambak udang	28,95
		Perbaikan jalan dan lahan parker	57,89
	Lainnya	23,68	

Pengembangan kawasan pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata tentunya akan memberikan manfaat dan harapan baru bagi masyarakat.

Tabel 5. Persepsi masyarakat tentang manfaat dan harapan.

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase (%)
1	Manfaat yang akan diperoleh dari pengembangan wisata dikawasan pesisir pantai	Membuka lapangan kerja baru	68,42
		Meningkatkan daya tarik kawasan	52,63
		Tidak ada manfaat	0
		Lainnya	15,79
2	Harapan masyarakat dengan adanya pengembangan wisata	Memberi lapangan kerja	44,74
		Meningkatkan perekonomian	31,58
		Mengangkat potensi daerah	34,21
		Menjadi daerah tujuan wisata kabupaten	21,05
		Lainnya	10,53

➤ Tambak udang

Pengembangan tambak udang di pesisir pantai timur kabupaten Lampung Selatan memang sering kali menjadi perdebatan. Namun, keberadaan tambak udang ternyata mampu mengangkat potensi daerah pada sektor perikanan. Masyarakat sekitar pesisir pantai memiliki persepsi dan pandangan tersendiri terhadap dampak yang timbul keberadaan tambak udang di kawasan tersebut. Berikut pernyataan masyarakat mengenai dampak adanya tambak udang yang tersaji pada tabel 15.

Tabel 6. Persepsi masyarakat tentang tambak udang

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Dampak positif yang dirasakan	Meningkatkan perekonomian masyarakat	8	21,05
		Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar	5	13,16
		Mengangkat potensi daerah	12	31,58
		Lainnya	1	2,63
2	Dampak negatif yang dirasakan	Pencemaran lingkungan	5	13,16
		Dikuasai asing	7	18,42
		Lainnya	0	0

2. Persepsi Pemerintah

➤ Persepsi Pemerintah mengenai adanya mangrove.

Berdasarkan hasil kuisioner mengenai pendapat pemerintah persentase sebanyak 75% sangat setuju dengan adanya/keberadaan mangrove di pesisir pantai desa Bakuheni dan 25% menyatakan setuju. Artinya, tingkat pemahaman pemerintahan mengenai keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir sangatlah baik. Keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir pantai desa Bakuheni dirasa sangatlah penting guna mengantisipasi dan menanggulangi abrasi pantai disekitar kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuisioner mengenai peranan penting hutan mangrove di kawasan pesisir pantai yakni sebesar 100% pemerintah menyatakan sangat penting. Sedangkan pendapat pemerintah mengenai kondisi hutan mangrove saat ini ialah 87,5% menyatakan tidak terganggu dan 12,5% pemerintah menyatakan terjaga. Tingkat pengetahuan tentang kondisi mangrove di kalangan pemerintah dirasa sangat penting guna penentuan kebijakan dan langkah ke depan dalam menangani kerusakan mangrove yang ada di kawasan pesisir pantai desa Bakuheni.

➤ Persepsi pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata.

Sebagai pemangku kebijakan pemerintahan memiliki peran penting dan wewenang dalam mendukung, memutuskan dan memberikan izin dalam melakukan perencanaan setiap objek penelitian. Penggunaan elemen pemerintah dalam penataan pesisir pantai Desa Bakuheni ialah untuk mengetahui

keselarasan program dan kebijakan yang telah diatur maupun dibuat sesuai dengan pengembangan tataruang kawasan serta mengetahui dukungan yang pemerintah berikan untuk masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata.

Tabel 17. Persepsi pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
	Jika pesisir pantai area tambak dan hutan mangrove dikembangkan sebagai ekowisata	Sangat setuju	5	62,5
		Setuju	3	37,5
		Tidak setuju	0	0
		Sangat tidak setuju	0	0

Rasa nyaman dan aman menjadi hal terpenting bagi wisatawan yang perlu diperhatikan oleh pengembang dan pengelola kawasan wisata. Penyediaan fasilitas penunjang juga sangat perlu untuk mendukung pengembangan kawasan ekowisata. Fasilitas yang perlu disediakan seperti tempat penginapan, tempat parkir, tempat ibadah, rumah makan dan pusat informasi/tempat penerimaan pengunjung. Hasil keisioner tersaji pada tabel 18 .

Tabel 7. Persepsi mengenai pengadaan sarana dan prasarana.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Fasilitas yang disediakan guna mendukung berkembangannya ekowisata	Tempat penginapan	5	62.5
		Tempat parker	8	100
		Tempat ibadah	8	100
		Rumah makan	7	87,5
2	Fasilitas umum yang perlu diberikan untuk menjangkau kawasan pesisir pantai	Pusat informasi/tempat penerimaan pengunjung	6	75
		Pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai	5	62,5
		Pembukaan jalur alternative	3	37,5
		Perbaikan akses jalan masuk	6	75

Pendapat pemerintah tentang partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan pada tabel 19.

Tabel 8. Persepsi pemerintah mengenai dukungan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
	Partisipasi masyarakat mengenai pengembangan ekowisata	Sangat mendukung dan ingin berpartisipasi dalam mengelolanya	7	87,5
		Mendukung dan tidak ikut serta dalam pengeolaannya	1	12,5
		Tidak mendukung Masyarakat acuh terhadap pengembangan	0	0
			0	0

Arah pengembangan wisata perlu diperhatikan dan diselaraskan dengan tujuan wisatawan yang akan berkunjung, potensi yang diunggulkan dan upaya pemerintah dalam mendukung berkembangnya suatu kawasan wisata. Pendapat dan pernyataan pemerintah dalam hal ini terdapat pada hasil kuesioner tabel 20.

Tabel 9. Persepsi mengenai tujuan kunjungan wisata potensi unggulan yang dikembangkan serta upaya pemerintah dalam mendukung

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Motivasi wisatawan berkunjung	Sekedar rekreasi	4	50
		Ingin belajar dan mengetahui tentang tanaman mangrove	3	37,5
		Hanya sekedar ingin menikmati suasana	1	12,5
		Ingin berpartisipasi dalam menanam mangrove untuk menjaga kelestarian kawasan	0	0
2	Potensi yang diunggulkan dalam pengembangan ekowisata	Target pengunjung	2	25
		Keberagaman jenis mangrove	4	50
		Sumber daya alam/potensi	2	25

		Wisata tambak	0	0
	Upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata	Memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan pesisir pantai sebagai kawasan konservasi mangrove	3	37,5
3		Ikut mengawasi kawasan pesisir pantai sebagai kawasan konservasi	4	50
		Ikut serta dalam pengelolaan	0	0
		Memberikan bantuan materi	1	12,5

D. Aksesibilitas

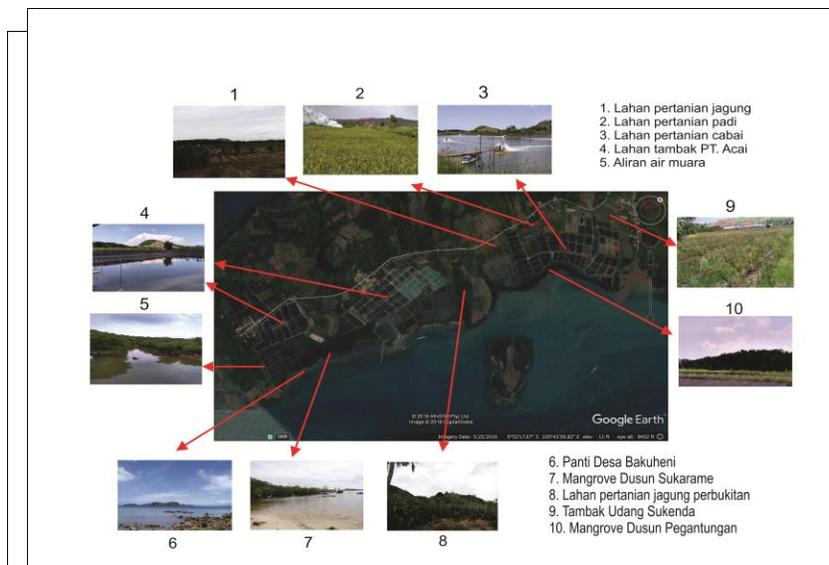
Untuk mengetahui tingkat kemudahan akses kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni selain dapat diketahui dengan survei langsung dilapangan diperlukan juga persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni rea tambak dan hutan mangrove yang tersaji dalam tabel 21.

Tabel 10. Persepsi masyarakat terhadap aksesibilitas kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Akses menuju kawasan pesisir pantai	Sulit	34	89,47
		Mudah	4	10,53
2	Penyebab kawasan pesisir pantai sulit diakses	Tidak ada jalan utama menuju kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	18	47,37
		Kendaraan bermotor tidak dapat menjangkau kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	1	2,63
		Tambak udang menutup akses ke kawasan area mangrove	12	31,58
		Lainnya	3	7,89
3	Saran agar akses menjadi mudah	Perbaiki jalan utama menuju kawasan pesisir pantai area mangrove dan	31	81,58

	tambak udang		
	Tidak perlu perbaikan, jalur utama sudah bagus	0	0
	Perlu adanya jalur alternative	4	10,53
	Lainnya	3	7,89
4	Jika mudah saran yang diberikan	22	57,89
	Pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai area mangrove dan tambak udang	6	15,79
	Pembukaan jalur untuk kendaraan bermotor	6	15,79
	Perluasan/pelebaran akses jalan enuju mangrove	6	15,79
	Lainnya	4	10,53

E. Identifikasi Potensi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakuheni.



Gambar 9. Peta Potensi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakuheni.

F. Konsep Penataan Pesisir Ruang Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Lampung Selatan.

Penyusunan rencana program RZWP-3K ini sudah ada sejak tahun 2013-2033. Perencanaan program tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi program kerja Bappeda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013.

Berikut ini adalah dasar hukum Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Lulai Kecil.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Masukkan tabel rencana sistem perkotaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

G. Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakuheni



Gambar 3. Peta Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Desa Bakuheni

H. Desain Rencana Penataan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Desa Bakuheni



Gambar 13. Desain Kawasan Ekowisata Pesisir Pantai Desa Bakuheni.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Potensi yang ada di kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni meliputi potensi perikanan, potensi pertanian, potensi sumber daya alam (hutan mangrove dan pantai), potensi sosial budaya dan ekonomi.
- Penyusunan konsep penataan kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni sebagai kawasan ekowisata terdiri dari pemilihan jenis tanaman dan pola tanam, pembuatan tanggul abrasi, penyediaan fasilitas umum dan penyediaan sarana prasarana penunjang bagi wisatawan.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai adanya dokumen perencanaan yang meliputi detail pengembangan ekowisata hutan mangrove dalam bentuk siteplan.
2. Perlu adanya pendampingan pihak pemerintah dan lembaga lingkungan hidup aktif melakukan sosialisasi serta pelatihan mengenai pendidikan ekowisata untuk masyarakat lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Dalam perkembangannya nanti diharapkan ekowisata hutan mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Bakuheni dapat menjadi wisata perintis yang ramah lingkungan untuk mewujudkan lanskap pesisir yang lebih baik
3. Perlu dilakukannya musyawarah untuk penyelesaian mengenai masalah status kawasan yang kepemilikannya masih tumpang tindih dengan pihak-pihak terkait yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksornkoe, S. 1993. *Ecology and management of Mangrove*. The IUCN Wetlands Programme. Bangkok. Thailand.
- Alamendah. 2011. Definisi Hutan Bakau Hutan Mangrove dan Fungsi. Dalam web: <http://alamendah.org/2011/02/18/hutan-bakau-hutan-mangrove-definisi-dan-fungsi/comment-page-5>. Diakses tanggal 8 Februari 2017.
- Ambo Tuwo.2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Brilian Internasional, Surabaya.
- Anonim. 2015. Pengembangan Ekowisata Kebun Pasewaran Patai Kampe Kabupaten Banyuwangi. Dalam web: https://www.academia.edu/9186699/PENGEMBANGAN_EKOWISATA_KEBUN_PASEWARAN_PANTAI_KAMPE_KABUPATEN_BANYUWANGI. Diakses tanggal 20 April 2106.
- Anonim. 2016. Konsep-konsep Dasar Ekowisata. Dalam web: <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/ekowisata>. Diakses tanggal 20 April 2106.
- Arrijani. Dede, Edi, G.S. dan Ibnul, Q. 2006. Analisis Vegetasi Hulu DAS Cianjur Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. Biodiversitas, Volume 7.
- Bengen D. G. 2001. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Bengen, D.G. 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Bengen, D. G. 2004. Sinopsis Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir Dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL) IPB, Bogor.
- Bengen, D.G. 2000. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya Pesisir(Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu,

- Bogor 13-18 November 2000. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan (IPB).
- Branch M.C. 1998. Regional Planning, In Introduction and Explanation Preager. New York Westport Connection, London.
- Budiharsono. 2002. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ceballos-Lascurain, Hector. 1996. Tourism, Ecotourism and Protected Areas. IUCN. The World Conservation Union. Gland. Switzerland.
- Cicin-Sain, Billiana and Robert W.Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management- Concept and Practices. Island Press. Washington, D.C. Covelo, California.
- Dahuri, R. et al. 1998. Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan yang Berakar dari Masyarakat Kerjasama Ditjen Bangda dengan Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan. IPB. Laporan Akhir.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., Sitepu, M. J. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. . PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, Y., Putra, S.G., Sitepu, M.J., 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Darwanto, Herry dan Dwiagus Stepantoro. 2000. Penataan Ruang Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, serta Hubungan Dengan Penataan Ruang Wilayah, *Makalah Lokakarya Pendekatan Penataan Ruang dalam Menunjang Pengembangan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan RI. 2002. Keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Kerjasama DKP dengan USAID-Bappenas-URI *Coastal Resources Management Project*. 51 hal.
- Djau MS. 2012. Analisis keberlanjutan perikanan di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Olele dan perairan sekitarnya Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.[Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Febriana, R.T. 2012. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove untuk Pengembangan Ekowisata di Kawasan Tapak, kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang. http://fpik.undip.ac.id/skripsi/shared/biblio_view.php.
- Giesen, W. & B. van Balen. 1991. Several Short Surveys of Sumatran Wetlands. Notes and Observations. Laporan Proyek PHPA/AWB Sumatra Wetlands No. 26, 98 hal.
- Giesen, W. & Sukotjo. 1991. Karang Gading-Langkat Timur Laut Wildlife Reserve (North Sumatra). Laporan Proyek PHPA/AWB Sumatra Wetland No. 10, 48 hal.
- Gunn, C. A., 1997. *Vacationscape: Developing Tourist Area*. United States of A, Erica: Taylor & Francis.
- Haeruman, HJ. 1999. Profil 111 Kawasan Andalan Indonesia. Jakarta: Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

- Helmi F. 2010. Kontestasi penguasaan sumber daya hutan di Provinsi Aceh: kasus Desa Jamur Konyel, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.
- Husein Umar, 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrawan, M., Primack, R. B., dan Supriatna, J. 2012. Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Irpal Gusnandi. 2014. Perencanaan Kawasan Pesisir Pantai Berbasis Ekowisata. Dalam web:
https://www.academia.edu/10452102/PERENCANAAN_KAWASAN_PESISIR_BERBASIS_EKOWISATA. Diakses tanggal 20 April 2016.
- Macnae, W. 1968. "A General Account of the Fauna and Flora Of Mangrove Swamp and Forest in the Indo-West Pacific Region". Adv. Mar. Biol, 6:73-270.
- Nazir, Moh. 1983. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nugroho, I. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Nugroho, I., Dahuri, R. 2012. Pembangunan Wilayah; Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Nybakken. J. W. 1988. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Alih Bahasa: E.H. Eidman, Koesoebiono. D. G. Bengen, M. Hutomo, & S. Sukardjo. Gramedia. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Lampung. 2000. Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama Pemerintahan Daerah Lampung dengan Proyek Pesisir Lampung. (Pusat Kajian Pesisir Universitas Rhode Island dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor).
- Pirzan, A.M. 2000. Pelestarian Sumberdaya Kepiting Bakau *Scylla* sp. di Perairan Pantai Timur Sulawesi Selatan, Jurnal Litbang Pertanian. 19(2) hal 18-27.
- Purnama SI. 2005. Penyusunan Zonasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru Berdasarkan Kerentanan Kawasan dan Aktivitas Masyarakat [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Purnobasuki, H. 2005. Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove. Airlangga University Press. Surabaya.
- Putra Alam. 2012. Ekowisata. Dalam web: <http://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 20 April 2106.
- Rayes, M.L. 2006. Deskripsi Profil Tanah di Lapangan. Unit Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. 133 hal.
- Saleh. 2002. Kumpulan Hasil-Hasil Penelitian Pasca Panen Perikanan. Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. DKP. Jakarta
- Sarosa, S. (2012), Penelitian Kualitatif, PT. Indeks, Jakarta.
- Sastrayuda, Gumelar. 2010. "Konsep Pengembangan Kawasan Ekowisata". Yogyakarta.
- Siswanto Sastrohadiwiryo. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. edisi 2. PT. Bumu Aksara, Jakarta.
- Soerianegara, I. dan A. Indrawan. 1998. Ekologi Hutan Indonesia. Buku. Laboratorium Ekologi Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor. 126 hal.
- Sofian Effendi dan Takiran. 2012. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.

- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sulasdi, W.N. 2000. Potensi Sumberdaya Kelautan Non-Perikanan Serta Pola Pemanfaatannya Dalam Perspektif Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut: Suatu Kaftan Pada Skala Makro Menggunakan Konsep Klasifikasi, Standarisasi dan Spesifikasi ; makalah disampaikan pada Temu Pakar "Konsep Pengembangan Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil melalui Pendekatan Ruang, Ditjen P3K, DKP , Jakarta 10 Oktober 2000.
- Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Jakarta: Gramedia.
- Suryadi, 2004. Struktur Komunitas Juvenil Ikan, Krustasea, Gastropoda Hubungannya Dengan Karakteristik Habitat Pada Ekosistem Mangrove Di Kabupaten Sinjai. [Skripsi]. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Tahir, A., Bengen, D.G., dan Susilo, S.B. 2002. Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Balikpapan. Jurnal Pesisir&Lautan, ISSN 1410-7821, Nomor 3, 2002, Hal 1-16.
- Wantasen, Adnan. 2002. Kajian Potensi Sumberdaya Hutan Mangrove di Desa Talise Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Institut Pertanian Bogor http://tumoutou.net/702_05123/adnan_wantasen.pdf. Diakses tanggal 13 Maret 201.
- Windsari, R. 2016. Identifikasi Potensi Lanskap Agrowisata Di Kawasan Pantai Bugel Kabupaten Kulon Progo (Skripsi). Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wood. M. E. 2002. Ecotourism : Principles, Pratices and Politicies For Sustainability. United Nations Environment Programe (UNEP).